

**PENERAPAN PERJANJIAN AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH DALAM
SKEMA PEMBIAYAAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus Di KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Banyuputih)

Oleh:

Muhammad Rosid

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Bondowoso

muhammadsirajulmunir24@gmail.com

ABSTRACT

Implementation of the Akad Mudharabah Muqayyadah Agreement in the Islamic Law Perfektif Financing Scheme Case Study at KJKS BMT-UGT Sidogiri Branch Of Banyuputih Situbondo Maid.

The purpose of this study is to determine if the principles of the muqayyadah mudharabah agreement at the Baitul Maal wat Tamwil Islamic Financial Services Cooperative (KJKS BMT-UGT Sidogiri) banyuputih auxiliary branch comply with Islamic sharia. and the elements that lead to the promise being broken (wansprestasi) in the funding of this mudharabah, as well as how to fix it.

Using Primary and Skunder.data data sources, this study adopts a combination doctrinal (normative) and empirical (non-doktrial) approach of combining. Data collection techniques include conducting interviews, observations, and literature studies, followed by data analysis techniques using qualitative analysis. Secondary legal materials include primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as primary, secondary, and tertiary legal materials.

The values contained in the principles of the mudharabah agreement on Baitil Maal wat Tamwil (BMT) Sidogiri Capem Banyuputih in mudharabah financing products have been found to be in accordance with Islamic law, because the principles of the mudharabah agreement akad mudharabah, based on (al-mabadi al-ammanah), namely the value of justice (al-i) have been implemented (at tasamuh).

Inadequate human resources, management of Islamic financial institutions, information systems and technology, and the lack of moral standards set in financing activities are the elements that lead the mudharabah agreement to be broken. Then mastering the technical components, philosophical law of Sharia economy, and sharia economic law is a solution. In the event of a breach of the agreement, the peace system (sulhu) of the arbitration court (tahkim) and the legal process are used to address the situation (al-qadha).

Keywords: *Financing; Mudharabah.*

ABSTRAK

Penerapan Perjanjian Akad Mudharabah Muqayyadah dalam Skema Pembiayaan Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Banyuputih Situbondo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip perjanjian akad *mudharabah muqayyadah* pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal wat Tamwil* (KJKS BMT-UGT Sidogiri) cabang pembantu Banyuputih sudah sesuai dengan syariat Islam? dan faktor-faktor yang menyebabkan apa yang menyebabkan ingkar janji (*wansprestasi*) dalam pembiayaan mudharabah ini serta bagaimana cara penyelsaiannya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan gabungan doktrinal (normatif) dan empiris (non-doktrial), dengan menggunakan sumber data Primer dan Sekunder. Sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sedang teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara, observasi dan studi kepustakaan, kemudian teknik analisa data menggunakan analisa kualitatif.

Dari hasil penelitian ini ditemukan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip-prinsip perjanjian akad *mudharabah* pada *Baitil Maal wat Tamwil* (BMT) Sidogiri Capem Banyuputih dalam produk pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah dilaksanakan prinsip-prinsip perjanjian *akad mudharabah*, dengan berlandaskan (*al-mabadi al-amanah*) yakni nilai keadilan (*al-adalah*), kesetaraan (*al-musawah*), musyawarah (*al-syurah*), saling membantu (*al-ta'awun*) dan toleransi (*at tasamuh*).

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ingkar janji dalam akad *mudharabah* disebabkan kurang memadainya sumber daya manusia, manajemen lembaga keuangan syariah, sistem informasi dan teknologi, serta tidak adanya standar moral yang ditetapkan dalam kegiatan pembiayaan. Kemudian sebagai solusinya adalah harus menguasai aspek teknis, hukum filosofis ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah. Jika terjadi pelanggaran perjanjian diselesaikan dengan sistem perdamaian (*sulhu*) kemudian arbitrase (*tahkim*) dan dengan proses peradilan (*al-qadha*).

Kata kunci: *Pembiayaan; Mudharabah.*

A. PENDAHULUAN

Gagasan untuk mendirikan bank Syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada Seminar Internasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Namun ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini:

1. Operasi Bank Syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, dan karena itu, tidak sejalan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang pokok Perbankan.
2. Konsep Bank Syariah dari segi politis berkonotasi ideologis, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep negara Islam, karena itu tidak dikehendaki pemerintah.

3. Masih dipertanyakan siapa yang bersedia manaruh modal dalam valuta semacam itu, sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia.

Akhirnya gagasan mengenai bank Syariah itu muncul lagi sejak tahun 1988, disaat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisikan Liberalisasi Industri Perbankan. Para Ulama' pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga tapi tidak ada satupun pragkat hukum yang dapat dirujuk. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama' tentang bunga bank dan perbankan di Cisana, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990. Yang kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama' Indonesia (MUI) dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan Bank Syari'ah di Indonesia.¹

Bank Muamalah Indonesia lahir sebagai hasil dari kerja tim Perbankan MUI tersebut diatas. Pada tanggal 1 Mei 1992, Bank muamalah Indonesia mulai beroperasi kemudian pada tanggal 30 Oktober 1992 telah mengeluarkan peraturan pemerintah No.72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Kemudian menindaklajuti peraturan tersebut pemerintah mengeluarkan UU. No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang didalamnya mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan Usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah lahir sebagai alternatif terhadap persoalan bunga bank, karena bank syariah merupakan lembaga keuangan/perbankan yang beroperasi dan produknya dengan prinsip dasar tanpa menggunakan sistem bunga dengan menawarkan sistem bagi hasil yakni yang sesuai dengan syari'at Islam.

Prinsip inilah yang membedakan secara prinsipil antara sistem oprasional bank Syariah dengan Bank Konvensional. Bagi Bank konvensional bunga merupakan hal penting untuk menarik para investor menginvestasikan modalnya pada suatu bank. Semakin tinggi tingkat bunganya semakin tertarik para investor menabung. Tingkat suku bunga merupakan unsur penting dalam sistem perbankan konvensional. Bank Syariah yang berkerja menggunakan sistem non bunga melalui transaksi dengan menggunakan sistem pembagian keuntungan dan kerugian *profit and loss sharing (PLS.)*² begitu juga perbankan syariah memberikan jasa-jasa lain sebagaimana yang dilakukan bank konvensional, hanya saja yang

¹ Moh. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Depok: Gema Insani 2009) hlm. 3

² Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Grafiti 2005) hlm, 1

membedakan hanya dalam perbankan syariah menggunakan bagi hasil. Keuntungan dan kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu: (*mudharib* dan *shahibul maal*).³

Dalam sistem bunga Bank dan bagi hasil mempunyai sisi persamaan yaitu sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik modal, namun keduanya memiliki perbedaan yang prinsipil, yaitu sistem bunga uang yang merupakan sistem yang dilarang agama Islam, sedangkan bagi hasil merupakan keuntungan yang tidak mengandung riba sehingga tidak diharamkan oleh ajaran Islam.⁴

Sistem bagi hasil mempunyai keuntungan sebab tidak akan menimbulkan *negative spread*,⁵ pertumbuhan modal negative, dalam permodalan Bank sebagaimana yang biasa terjadi dalam perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga. Hal itu terjadi disatu pihak disebabkan karena adanya tingkat suku bunga deposito yang tinggi, dan dilain pihak bunga kredit dibebani tingkat bunga yang rendah, untuk menarik para investor menanamkan modalnya.

Penentuan bunga dibuat waktu akad berlangsung dengan asumsi harus selalu untung tidak ada asumsi kerugian pembayaran bunga tetap dilakukan misalnya dalam suatu proyek, tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan itu mempunyai keuntungan atau tidak. Sedangkan sistem bagi hasil, penentuan besarnya rasio atau *nisbah* bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Maka dalam suatu proyek yang dilakukan nasabah, apabila mengalami kerugian akan ditanggung bersama.⁶ Sisi lain pada sistem bagi hasil, ialah jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan, sedangkan konvensional jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungannya berlipat.⁷

Bunga bank adalah masuk dalam katagori *riba'*, banyak kalangan memberikan gambaran bahwa *riba'* adalah haram. Sebagaimana hal tersebut terdapat dalam fatwa Majelis Ulama' indonesia (MUI) Nomor 1 tahun 2004, tentang bunga (*interest/fa'ida*) yang saya

³ Mudharib disini adalah seseorang yang menerima tanggung jawab yang diamanakan oleh pihak pemberi dana (bank) yang bertugas sebagai pengelola dana (nasabah) dengan skill usaha yang dimiliki. Sedangkan Shahibul maal ialah pihak pemilik modal atau pemberi amanat modal kepada pengusaha.

⁴ Muslimin H. Kara, Dr. M.Ag, *Bank Syariah di Indonesia Analisa Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, (Jakarta: UII Press 2005) hlm, 72

⁵ Negative spread adalah selisih yang disebabkan oleh tingkat bunga aktiva lebih rendah jika dibandingkan dengan kepekaan tingkat bunga pasiva. Bank memiliki kewajiban bunga lebih cepat dari pada pendapatan bunga mengakibatkan rawan hutang (baca Trikaloka H. Putri, *Kamus Perbankan*, (Jogjakarta: Mitra Pelajar 2009) hlm, 223

⁶ Moh. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Depok: Gema Insani 2009) hlm. 61

⁷ *Ibid*, 61

anggap merupakan tinjauan yang valid dan kompeten mengenai paerkara riba' dan bunga.⁸ Lebih lanjut dapat dibaca larangan memakan riba tersebut dalam (QS. Al-Imran (3) Ayat 130) yakni:

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*⁹

Begitu juga Rasulullah SAW telah memberikan larangan keras bagi seseorang pelaku yang bergelut dalam bidang riba', secara lengkap sabda beliau yang diriwayatkan oleh Muslim yang ditulis oleh Ibnu Hajar dalam bukunya Bulughul Al-Marom yakni:

عن جابر رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلي الله عليه وسام آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء (رواه مسلم)

*Artinya: Dari Jabir Radliyallaahu 'anhu berkata: "Rasulallahu Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melaknat pemakan riba', pemberi makanan riba' penulisnya, dan dua orang saksinya", beliau bersabda: "mereka itu sama". (Riwayat Muslim).*¹⁰

Langkah perbankan syariah dalam beroperasi benar-benar sesuai dengan ketentuan ajaran yang berlaku di dalam agama Islam dan bahkan di semua agamapun sependapat dengan ketentuan syar'i tersebut, selain mampu menghindarkan dari dampak negatif penerapan bunga, Bank syariah dengan sistem bagi hasil dinilai mengalokasikan sumber daya dan sumber dana secara efisien. Kemampuan untuk mengalokasikan sumber secara efisien inilah merupakan modal utama untuk menghadapi persaingan pasar dan perolehan laba di dalam peraturan pemerintah dijelaskan lebih lanjut bahwa "yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil dalam peraturan ini adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat". Sedang tujuan diberlakukannya ketentuan syar'i tersebut adalah untuk menjaga kelestarian agama (*hifdhul dien*), menjaga keselamatan jiwa (*hifdhul nafs*), menjaga keselamatan akal (*hifdhul aqli*), menjaga keselamatan keturunan (*hifdhul nasl*), dan untuk menjaga keselamatan harta (*hifdhul maal*).¹¹

Disamping adanya landasan syariah yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang menyangkut bank Syariah antara lain Undang-undang No. 10 Tahun 1998 sebagai revisi Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan serta Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, juga terdapat hal beberapa perbedaan diantaranya yang menyangkut

⁸ Frassminggi Kamasa, *The Age of Deception: Riba' Dalam Globalisasi Ekonomi, Global dan Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani 2012) hlm, 115

⁹ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Mush-Haf Asy Syarif 1971) hlm, 97

¹⁰ Ibnu Hajar, Terjeh. *Bulughul al-maram min adil al-lati al-ahkam*. (Bandung: Alma'arif 1995) hlm, 309

¹¹ H. Moh. Djakfar, SH. M.Ag, *Teologi Ekonomi: Membumikan Titah Langit Kerana Bisnis*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010) hlm, 33

aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja dan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi serta adanya sistem bagi hasil.

Meskipun Bank Syariah semakin cerah tetapi agar lebih dikenal masyarakat secara luas perlu keberpihakan pemerintah khususnya program-program yang nyata mengingat bank syariah belum banyak dikenal masyarakat.

Produk-produk yang dikeluarkan Bank Syariah cukup variatif, sehingga bagi calon nasabah dapat memilih berbagai produk atau alternatif bagi calon nasabah untuk memanfaatkannya. Dari survei yang pernah dilakukan, kebanyakan bank Syariah masih mengedepankan produk dengan akad investasi, yakni diantaranya prinsip bagi hasil, (*al-musyarakah* dan *al-mudharabah*) hanya saja dalam perjalanannya masih banyak kendala, kalau di lihat dari aset dan modal sudah sangat lumayan untuk ukuran perbankan yang usianya masih seumur jagung, akan tetapi untuk menjaga nasabah sampai pada sasaran sebagaimana perbankan konvensional masih banyak mengalami kendala.

Diantara kendala yang menghambat perkembangan perbankan syariah adalah karena masih terbatasnya jaringan perbankan syariah juga masih sedikit Badan Usaha Syariah (BUS) dan Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) serta Unit Usaha Syariah (UUS) dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

Demikian halnya dengan keberadaan KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Banyuwangi yang salah satu prinsipnya adalah untuk mewujudkan Lembaga Keuangan Syariah yang dapat menjadi tumpuan masyarakat dalam bidang simpanan dan pembiayaan yang mengutamakan aspek manfaat jangka panjang. Ini memang pantas untuk dikaji dan diteliti oleh penulis, mengingat Lembaga Keuangan Syariah ini dalam menjalankan kegiatan usahanya sejak berdiri pada tahun 2000 sampai saat ini (2016) menunjukkan adanya perkembangan yang cukup menyakinkan dengan telah terbentuknya beberapa kantor cabang pembantu yang tersebar di 27 provinsi disamping kantor pusat sebagai induknya.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus,¹² penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.¹³ Penelitian kualitatif juga bisa diartikan penelitian yang menekankan

¹² Ini sebuah penelitian yang mengungkap suatu transaksi produk pembiayaan di lembaga perbankan syariah dalam akad *Mudharabah* dalam perspektif hukum Islam. Karena untuk memahami fenomena secara menyeluruh tentunya harus memahami seganap konteks dan penjabarannya dengan dideskriptifkan.

¹³ Bagong Suyanto dan Sutina. *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Prenada Media, 2005) Hlm. 166

pada *quality* atau hal yang terpenting dari suatu barang atau jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa fenomena/gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori.

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Menurut Jhony Ibrahim, penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya (asas-asas, prinsip-prinsip, kaidah-kaidah) yang terdapat dalam aturan perundang-undangan.¹⁴

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penerapan Prinsip-Prinsip Perjanjian Akad *Mudharabah* pada KJKS BMT-UGT Cabang Pembantu Banyuputih dan Kesesuaiannya Menurut Presfeksi Hukum Islam.

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan pembiayaan yang dikukan oleh pihak KJKS BMT-UGT Sidogiri cabang pembantu Banyuputih dalam skema produk pembiayaan UGT MUB (Modal Usaha Barokah), diamana pihak BMT selaku *Shahibul maal* dengan nasabah sebagai *mudharib* untuk melakukan kerjasama dengan prinsip bagi hasil. Untuk mewujudkan pembiayaan mudharabah dengan cepat dan akurat serta dapat dipertanggung jawabkan maka diperlukanlah kerja sama yang baik disetiap unit yang berhubungan dengan pembiayaan pada umumnya dan pembiayaan mudharabah pada khususnya.

Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana atau mudharib tidak melakukan penyimpangan maka BMT Sidogiri dapat meminta anggunan berupa barang yang berharga kepada calon nasabah yang ingin melakukan kerja sama usaha dengan KJKS BMT-UGT Sidogiri. Jaminan disini disimpan hingga selesai transaksi akad kerjasama usaha antara kedua belah pihak dan kemungkinan terburuk akan dicairkan oleh BMT apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad, namun jaminan bukan merupakan syarat utama dalam pembiayaan mudharabah di KJKS BMT-UGT Sidogiri capem Banyuputih, akan tetapi karakter nasabah dan besar kecilnya usaha merupakan dasar yang berperan dalam layaknya pemberian suatu pembiayaan mudharabah.

Kendati demikian Untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip akad *mudharabah* pada KJKS BMT-UGT Sidogiri cabang pembantu Banyuputih sesuai dengan syariat Islam dan terjadinya ingkar janji (*wanprestasi*) dalam akad *mudharabah* di BMT Sidogiri cabang pembantu serta bagaimana cara penyelesaiannya penulis dalam menganalisa teori analisis yang

¹⁴ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Banyumedia Publising, 2005) hlm, 46

digunakan adalah analisis kualitatif yaitu mereduksi data dan menyajikan data kemudian membuat kesimpulan.

Lembaga keuangan syariah KJKS BMT-UGT Sidogiri merupakan lembaga intermediasi mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang mengalami kekurangan dana (*lack of funds*), seperti mengimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan, dan deposito, dan nyalurkannya melalui produk pembiayaan yang mengoprasikan sesuai prinsip syariah.

Prinsip-prinsip tersebut secara garis besar telah dituangkan dalam akad pembiayaan *mudharabah/musyarakah* usaha yang dilakukan BMT Sidogiri ini berlandaskan pada KHES Pasal 1 disebutkan:

“Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah”¹⁵

Dengan demikian Islam mengajarkan bertransaksi kepada ummatnya berdasarkan atas prinsip keadilan dan kerelaan antara pelaku ekonomi. Untuk mewujudkan prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi, maka lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Secara umum prinsip bagi hasil itu dalam perbankan syariah menurut Muhammad Syafi'i Antonio dilakukan melalui empat akad yaitu: *al-mudharabah*, *al-musyarakah*, *al-muzaraah* dan *al-musaqah*.¹⁶

Dan Prinsip *mudharabah* atau bagi hasil sebagai fokus penelitian ini merupakan pengaturan keuangan yang paling mendapat dengan luas, sebagai pengganti intraksi yang berbasis bunga. Hal ini disebabkan karena dalam mekanisme bagi hasil positif (laba) maupun hasil negatif (rugi) akan dibagikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan maupun penggalangan dana, sesuai dengan kesepakatan awal, atau kata lain resiko akan didistribusikan secara lebih adil dan oprasional.

Berlandaskan uraian di atas bentuk kelembagaan koperasi dalam KJKS BMT-UGT Sidogiri merupakan kerja sama finansial antara pemegang saham sebagai pemilik modal dengan para pengurus (Dewan pengawas Syariah, Manager beserta Karyawan) sebagai pengelola untuk lembaga keuangan syariah berdasarkan visi dan misi yang diembannya. Bentuk kerjasama ini bukan sebatas melibatkan modal saja melainkan juga melibatkan unsur manusia.

¹⁵ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) edisi revisi*, (Jakarta: Kencana 2009) hlm, 3

¹⁶ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Bandung: Gema Insani 2009) hlm, 95

Bentuk perseroan dalam KJKS BMT-UGT Sidogiri ini sejalan dengan model perseroan yang diatur dalam hukum Islam yang biasa menggunakan istilah *syirkah*. Bentuk ini merupakan transaksi antara dua orang atau lebih yang sepakat melakukan kerja sama bersifat financial dengan tujuan mencari keuntungan sebagai sebuah kontrak, transaksi tersebut mengharuskan adanya *Ijab* dan *Qubul*¹⁷ yang menunjukkan bahwa salah satu pihak mengajak yang lain secara lisan ataupun tertulis untuk mengadakan kerja sama.

Prinsip *mudharabah* yang paling utama agar menjadi nilai kontrak yang islami dengan sifat mengikat antara pengelola modal dengan pemilik modal adalah dengan adanya *ijab* dan *qabul*. Pandangan islam tentang akad atau kontrak sebenarnya tidak ada batasan yang ketat bagaimana perjanjian itu di bentuk, ada konsep kebebasan melakukan akad dalam hal menentukan bentuk-bentuk suatu perjanjian yang digali berdasarkan dalil-dalil umum islam. Sebagaimana maksud dalam kaidah fiqhiyah sebagai berikut:

الاصل في الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم

*Artinya: Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah boleh dilakukan, hingga terdapat dalil yang mengharamkannya.*¹⁸

Kaidah ini mengindikasikan bahwa posisi syariah seperti dikemukakan Muhammad Nuru Fadli yang berbasis kepada prinsip kebebasan berkontrak adalah fleksibel. Sehingga jenis kontrak transaksi pada prinsipnya diperbolehkan, sepanjang dalam hal transaksi keuangan tidak berisi elemen riba' atau gharar.¹⁹

Secara lebih luas umat muslim dapat membuat perjanjian dengan syarat mengikat, saling menghormati untuk memenuhi adalah hukum wajib, berangkat dari kaidah diatas telah sesuai dengan keharusan yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Al-maidah ayat 1 yaitu:
*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu.*²⁰

Harus difahami dari pertemuan kedua orang adalah wujud keinginan untuk memunculkan kelaziman syara' yang dicari oleh kedua belah pihak. Akad tidak hanya dapat terwujud dengan adanya ikatan dua perkara secara nyata saja, akan tetapi terwujud juga dengan

¹⁷ Ijab adalah sesuatu yang muncul pertama kali dari salah seorang yang berakad, sedangkan qabul adalah sesuatu yang muncul dari pihak kedua sebagai pernyataan kerelaan atas pernyataan pertama dan memunculkan sesuatu kewajiban untuk memenuhi prestasi.

¹⁸ Imam Nahe'i & Asrah Maksum, *Mengenal Qawa'id Fiqhiyyah*, (Situbondo: Ibrahimy Press 2011) hlm, 63

¹⁹ Wawancara dengan bapak Muhammad Nurul Fadli (kepala kantor cabang banyuputih) KJKS BMT-UGT Sidogiri capem Banyuputih pada tanggal 15 Agustus 2016

²⁰ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Mush-Haf Asy Syarif 1971) hlm, 156

adanya ucapan dari salah satu pihak kemudian pihak lain mengerjakan sesuatu yang mewujudkan kehendaknya, dapat berupa tulisan, isyarat ataupun penyerahan.

Berdasarkan penjelasan di atas kemudian dapat difahami bahwa sebenarnya inti dari terciptanya suatu akad secara umum adalah terjadinya kehendak dua orang yang berakad dan ada kesesuaian antara keduanya untuk meunculkan kewajiban yang sifatnya syar'iah dari kedua belah pihak yang diindikasikan dari adanya suatu ungkapan tulisan, isyarat ataupun tindakan suatu akad menjadi mengikat bilamana memenuhi pokok rukunya yaitu *ijab* dan *qabul*.

Esensi akad adalah pencapaian kesepakatan kedua belah pihak, wujud perbuatan seseorang dianggap sebagai suatu pernyataan kehendak. Dalam hubungannya dengan BMT Sidogiri maka AD/ART menunjukkan adanya kesepakatan antara pemegang saham dan pengelola. AD/ART yang telah dibuat merupakan sebuah pernyataan pemegang saham untuk mengelola dana dan pengurus dianggap telah menyetujui perjanjian tersebut.

Dalam pandangan syari'ah menunjukkan bahwa koperasi masih menyisakan problem, namun problem tersebut sedapat mungkin diminimalisir dengan jalan mengakomodasi sejauh mungkin dimensi keadilan dan kesetaraan sebagaimana perjanjian prinsip Islam dalam melaksanakan perseroan itu sendiri. Pilihan format koperasi tertutup oleh KJKS BMT-UGT Sidogiri merupakan bentuk kerja sama finansial antara pemegang saham sebagai pemilik dana dan pengurus sebagai pengelola. AD/ART sebagai peraturan yang mengikat kedua belah pihak sehingga dikategorikan sebagai bentuk perjanjian yang dibenarkan oleh syari'ah.

Ada dua unsur utama yang terdapat dalam prinsip *mudharabah*. *Pertama* bentuk kerja sama finansial antara dua pihak, yang mana salah satu pihak sebagai pemilik modal dan yang lain sebagai pengelola. *Kedua*, dua pihak yang terlibat dalam kerja sama harus memperoleh bagian keuntungan jika terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

BMT sebagai sebuah lembaga intermediasi yang mempertemukan antara modal dan usaha, memiliki produk yang berupa penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan deposito serta produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Bentuk operasionalisasi kedua produk tersebut adalah menggunakan *prinsip mudharabah* (bagi hasil).

Dana yang telah terkumpul dari tabungan dan deposito itu kemudian disalurkan untuk kegiatan produktif melalui produk pembiayaan. Disatu sisi BMT sebagai *mudharib* dari nasabah/anggota yang menyimpan dananya di KJKS BMT Sidogiri dalam bentuk deposito atau simpanan, disisi lain BMT juga menyalurkan dana yang diperoleh dari anggota dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*. Dalam operasionalnya BMT tetap bertanggung jawab penuh mengelola modal yang dipercayakan itu dengan menjamin hak para penabung atau deposan jika

menarik kembali uangnya, maka dari itu tidak semua sumber dana (yang berasal dari tabungan atau deposito) disalurkan semua dalam bentuk pembiayaan.

Untuk kurun waktu tahun pertama, KJKS BMT-UGT Sidogiri menyalurkan pembiayaan *mudharabah* dengan dua katagori yaitu: pembiayaan rintail dan pembiayaan mudharabah. Dibanding dengan rintail pembiayaan *mudharabah* ini relative lebih sedikit, hal ini dapat dilihat pada masih rendahnya portofolio pembiayaan *mudharabah* di tiap-tiap bulan.

Dalam Oprasionalnya menerapkan pembiayaan *mudharabah* di KJKS BMT-UGT Sidogiri dengan prinsip bagi hasil dikatakan oleh Hairul Wasul, Account Office Pembiayaan (AOP) mengandung resiko yang tinggi. alasanya jika terjadi kerugian yang bukan karena kelalian nasabah/ anggota maka itu menjadi tanggung jawab BMT, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil *mudharabah* relatif lebih sedikit dibanding dengan pembiayaan rintail,²¹

Menurut Muhammad Nurul Fadli, (Kepala Cabang Banyuputih), faktor yang melatar belakangi minimnya pembiayaan *mudharabah* ialah bayak pengusaha yang tidak memenuhi standart prinsip mudharabah. Apabila dipaksakan untuk masuk dalam katagori pembiayaan mudharabah justru akan menyulitkan pengusaha itu sendiri dan juga akan mempengaruhi efisiensi oprasional KJKS BMT Sidogiri.²²

Prinsip analiasa pembiayaan dipergunakan dalam melakukan penelitian permohonan pembiayaan. Seorang petugas bagian lapangan harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon debitur yang meliputi:

- a. Penilaian terhadap karakter, watak dan kepribadian calon debitur (*character*)
- b. Pembiayaan secara subyektif tentang kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran (*capacity*)
- c. Penilaian terhadap kemampuan modal yang telah dimiliki oleh calon debitur (*capital*)
- d. Penilaian terhadap jaminan milik debitur (*collateral*)
- e. Penilaian terhadap kondisi perekonomian secara umum khususnya yang terkait dengan jenis usaha calon debitur (*condition*).²³

Bentuk kebijakan diatas seakan BMT kurang memberikan kepercayaan kepada calon nasabah, sementara nasabah tersebut berada dalam situasi yang sangat sulit berkaitan dengan modal

²¹ Wawancara dengan bapak Hairul Wasul (Account Office Pembiayaan/AOP) karyawan KJKS BMT-UGT Sidogiri capem Banyuputih pada tanggal 21 Agustus 2016

²² Wawancara dengan bapak Muhammad Nurul Fadli (kepala kantor cabang banyuputih) KJKS BMT-UGT Sidogiri capem Banyuputih pada tanggal 15 Agustus 2016

²³ *Ibid*

usahanya. Pada hal dalam kerjasama Islam mengajarkan untuk saling memberikan kepercayaan diantara para pihak yang terlibat tanpa adanya sikap saling curiga.

Prinsip analisa bagi BMT memang mutlak dilakukan sebagai kosekwensi dari amanah yang dipegangnya yaitu modal dari para pemegang saham dan para penyimpan, bukan dalam kapasitas tidak percaya dengan pihak yang diajak kerja sama, akan tetapi lebih pada sikap hati-hati demi menjaga amanah pemilik modal. Dengan analisa ini akan melahirkan kepercayaan dari pihak BMT kepada nasabah/anggota, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' Ayat 58:

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,*²⁴

Kaitanya dengan minimnya pembiayaan mudharabah, sebagaimana dikatakan Muhammad Nurul Fadli dan Hoirul wasul bahwa pada umumnya usaha kecil memiliki tingkat kelayakan yang masih renda akibat adanya keterbatasan aspek pemasaran, teknis produksi, manajemen dan organisasi. Pada umumnya mereka banyak yang belum memahami dan memenuhi persyaratan teknis lembaga keuangan, antara lain masalah penyediaan perizinan dan jaminan. Banyak usaha kecil yang dalam melakukan penyediaan permodalan tidak mengikuti fase atau tahapan pembiayaan yang semestinya.

Lebih lanjut untuk membina hubungan dengan KJKS BMT-UGT Sidogiri Muhammad Nurul Fadli (pimpinan BMT Sidogiri capem Banyuputih) juga memberikan saran kepada pengusaha sebelum mengajukan kredit, yaitu terlebih dahulu bertindak sebagai penabung atau menempatkan dananya dalam bentuk deposito bisa dikatakan sebelumnya menjadi anggota, hal ini penting karena semakin lama pengusaha menjadi nasabah/anggota di BMT dengan cara menabung berarti banker lebih mengenal pengusaha dengan lebih baik. Pada gilirannya tabungan dapat digunakan sebagai jaminan BMT dalam rangka memberikan kredit pembiayaan kepada pengusaha tersebut.²⁵

Esensi dari sebuah aktivitas ekonomi adalah bagaimana dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi barang dan jasa sehingga konsumsi masyarakat meningkat. Untuk merealisasikan hal tersebut perlu ditunjang dengan upaya dari pelaku ekonomi untuk dapat memanfaatkan potensi dan sumber daya ekonomi secara optimal dan

²⁴ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Mush-Haf Asy Syarif 1971) hlm, 128

²⁵ Wawancara dengan bapak Muhammad Nurul Fadli (kepala kantor cabang banyuputih) KJKS BMT-UGT Sidogiri capem Banyuputih pada tanggal 24 Agustus 2016

rasional. Etika bisnis yang menekankan aspek keadilan disamping meningkatkan keuntungan usaha merupakan bagian penting dalam usaha untuk menggerakkan kegiatan ekonomi.

Islam mengajarkan dalam melakukan kerjasama agar senantiasa dilandasi dengan prinsip keadilan dan kerelaan diantara para pihak yang terlibat didalamnya. Disinilah persoalannya mengapa dalam prinsip *mudharabah* para pihak harus memperoleh bagian yang proporsional dari keuntungan yang dihasilkan. Pemilik modal keuntungan merupakan bagian yang harus diterima sebagai hasil jerih payah dalam mengelola usaha.

Sebagai tujuan akhir dari aktivitas *mudharabah* keuntungan dari masing-masing pihak harus diketahui pada saat akad merupakan presentasi dari keuntungan yang dihasilkan. Dalam operasionalnya KJKS BMT-UGT Sidogiri capem Banyuputih keuntungan untuk produk penghimpunan dana (tabungan dan deposito mudharabah) berupa bagi hasil sesuai kesepakatan bersama antara bank dan nasabah, besaran nominal bagi hasil yang diberikan tergantung pendapatan BMT yang didapat dari produk pembiayaan.

Sebenarnya istilah yang tepat dalam kasus BMT untuk bagi hasil adalah *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan yang bersumber margin, komisi atau profisi penempatan dana di bank lain dan bukan hasil keuntungan. Sedangkan keuntungan, jika hasil usaha didasarkan pada prinsip *profit sharing* yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana.

Pada dasarnya kedua prinsip *profit sharing* maupun *revenue sharing* dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syari'ah, tetapi sebagaimana fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor: 15/DSN-MUI/IX/2000 untuk pembagian bagi hasil dari anggota/ nasabah yang menyimpan dananya dalam bentuk tabungan dan deposito mudharabah sebaiknya digunakan prinsip *revneu sharing*, jika dilihat dari segi kemaslahatannya.

Dalam produk pembiayaan BMT melakukan praktik *pre-determined return* dalam produk pembiayaan dengan ditetapkan sistem LR (*Leading Rate*) sebagai pedoman petugas lapangan untuk melakukan negosiasi nisbah bagi hasil dengan calon nasabah. LR dihitung berdasarkan beberapa faktor yang meliputi:

- a. COF (*Cost of Funds*) atau biaya dana untuk memberikan nisbah bagi hasil kepada penabung.
- b. OHC (*Overhead Cost*) yang terdiri dari biaya tenaga kerja, sewa kantor, pemeliharaan dan penyusutan aktiva, barang, jasa dan lain-lain.
- c. RISK (Resiko pembayaran)
- d. SPREAD yaitu keuntungan yang diharapkan dari pembiayaan yang dikeluarkan.

Pembiayaan akan direalisasikan apabila calon nasabah itu sanggup memberikan nisbah bagi hasil kepada BMT tiap bulan minimal sebesar tidak kurang dari standar LR. Suatu contoh BMT menetapkan LR sebesar 2% maka nisbah bagi hasil untuk BMT tidak kurang $2\% \times$ jumlah pembiayaan yang diberikan.

Kenyataan KJKS BMT-UGT menggunakan presentasi bagi hasil dalam bidang pembiayaan produk UGT MUB (Modal Usaha Barokah), namun produk pembiayaan UGT MUB yang menggunakan akad mudharabah tidak sembarang usaha yang dapat menggunakan pembiayaan mudharabah ini bisa dikatakan ada spesifikasi bidang usaha tertentu seperti bidang usaha pertanian. Dari ketentuan spesifikasi bidang usaha tersebut bisa dikatakan disatu sisi BMT masih bisa dalam memantau dan juga persentase yang diberikan sebagai nisbah bagi hasil masih dapat di perediksi dan ditentukan disisi lain bidang usaha yang dijalankan seperti ini sesuai dengan ketentuan fiqh ekonomi Islam yakni tidak keluar dari *lughotan* dan *ta'rif* nya akad *mudharabah*.

b. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Ingkar Janji (*Wanprestasi*) dalam Penerapan Akad *Mudharabah* di KJKS BMT-UGT Cabang Pembantu Banyuputih dan Cara penyelesaiannya.

Tidak selamanya setiap perjanjian akad *Mudharabah* berjalan sebagaimana yang diharapkan, beberapa gejolak, hambatan dan masalah sekecil apapun mungkin terjadi. Apabila debitur cidra janji, tidak menepati kewajibannya terhadap BMT sesuai isi perjanjian, dikatakan ia telah melakukan *wanprestasi*. Sebab terjadinya ingkar janji (*wanprestasi*) tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan karakter nasabah dan karakter proyek yang dibiayai sehingga dapat menimbulkan resiko, seperti rendahnya tingkat pendidikan utamanya pendidikan Islam yang dalam memahami konsep ibadah masih terpaku pada sholat, puasa, zakat dan haji belum dimaknai bahwa semua kegiatan ekonomi yang dilakukan berlandaskan konsep syariah termasuk ibadah juga. Dan sikap moralitas yang mengedepankan sikap kejujuran sehingga masih mudah untuk tidak melaksanakan isi perjanjian atau melanggar ketentuan yang disepakati demikian juga karena kelalaian nasabah sehingga dalam menjalankan dan pengelolaan usahanya tidak sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan antara BMT dan nasabah. Kemudian sebagian tindakan yang dikenakan kepada orang tersebut adalah sesuai kondisi dan alasannya.

Dalam menyelesaikan resiko yang terjadi akibat ingkar janji BMT Sidogiri memberlakukan sesuai dengan hukum perserikatan Islam yaitu melalui tiga jalan, yaitu:

Pertama menempuh jalan perdamaian *shulhu* antara kedua belah pihak dengan cara *ibra'* (membebaskan) debitur dari segala kewajibannya dan dengan cara *mufawwadhah*

(penggantian) dengan yang lain seperti menghibahkan sebagai (*shulhu hibah*), menjual barang (*shulhu bai'*) dan menyewakan barang (*shulhu ijarah*).

Kedua, dengan cara takhim (arbitrase) yaitu dua belah pihak mengangkat *hakim* sebagai wasit atau juri damai untuk mengakhiri sengketa dan kedua belah pihak tersebut akan mentaati penyelesaiannya oleh *hakim* yang mereka tunjuk itu.

Ketiga, adalah dengan cara peradilan (*al-qadha*). Penyelesaian sengketa ingkar janji secara adil dan mengikat melalui proses pengadilan sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.

Namun demikian, dalam penyelesaian dari akibat ingkar janji (*wanprestasi*) BMT belum pernah menempuh jalan melalui proses peradilan (*al-qadha*) selama ini masih dapat ditempuh melalui perdamaian dan melalui arbitrase.

Untuk mengatasi masalah kerugian, BMT menempuh kebijakan dengan penundaan angsuran pembayaran (cicilan pokok dan bagi hasil) pada bulan berikutnya. Jika kebijakan ini tidak membuahkan hasil maka pembayaran tersebut masuk dalam kategori kredit bermasalah dan tindakan yang diambil untuk menyelamatkan kredit biasanya dilakukan perpanjangan jangka waktu pembayaran, atau merubah jadwal pembayaran bisa juga merubah struktur pemberian kredit (*restructuring*).

Nasabah yang tidak menempati jadwal pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, bilamana terlambat lebih dari 10 hari atau lewat akhir bulan BMT melakukan tindakan dengan dikenakan tambahan biaya penagihan dengan sebutan dana *tabarru'* yang besarnya telah ditetapkan oleh pengurus. Ketentuan ini dituangkan dalam akad *mudharabah* yang secara otomatis menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kebijakan ini berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Bahwa lembaga keuangan syariah diperbolehkan untuk memberikan sanksi kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya. Sanksi berdasarkan *ta'zir* yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi ini dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat pada saat akad ditandatangani dan akan diperuntukkan sebagai dana sosial. Tindakan pemberian sanksi lebih mendapat legalitas dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Anfal ayat 27:

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah SWT dan Rasul (Muhammad SAW) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”*²⁶

Berbeda dengan uraian diatas, Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa akad *Mudharabah* sama sekali bukan merupakan perjanjian hutang piutang, melainkan perjanjian kerja sama mengenai usaha bersama dengan para pihak, memperjanjikan untuk berbagi hasil terhadap keuntungan yang dihasilkan. Sedangkan menurut Syafi’ Antonio dalam bukunya berpendapat akad *Mudharabah* ialah suatu perikatan usaha bersama antara pihak-pihak yang melakukan akad dimana pihak *shahibul maal* berinvestasi dana 100% , sedangkan pihak *mudharib* mengelolanya dengan skill yang dimiliki. Apabila ternyata usaha bersama itu mengalami kegagalan, maka hanya *shahibul maal* yang akan menanggung resiko finansial atas terjadinya kerugian tersebut dan *Mudharib* akan memikul resiko membuang pikiran, tenaga dan waktu serta kesempatan untuk memperoleh imbalan finansial.²⁷

Lebih tegas lembaga keuangan syariah tidak diperkenankan meminta jaminan apapun dari nasabah (*mudharib*) yang bertujuan untuk menjamin modal dari BMT yang diberikan kepada nasabah jika terjadi kerugian. Dalam *mudharabah* berlaku azas bahwa *Shahibul maal* maupun *Mudharib* keduanya harus menghadapi resiko. Keharusan pemberian jaminan oleh *mudharib* kepada *shahibul maal* berarti hanya *mudharib*-lah yang menanggung resiko bila terjadi kerugian, sedangkan lembaga perbankan akan terbebas untuk menanggung rugi karena ada sumber untuk resiko tersebut, yaitu hasil penjualan jaminan.

Pendapat diatas cukup beralasan, karena dalam akad pembiayaan *mudharabah*, kepercayaan (*amanah*) merupakan sesuatu azas terpenting. Kepercayaan dari *Shahibul maal* kepada *Mudharib* dan oleh karena itu seharusnya BMT tidak boleh meminta jaminan apapun dari *Mudharib* (Nasabah). Dengan kata lain dalam hal mempertimbangkan permohonan fasilitas pembiayaan dari calon *mudharib* lembaga BMT tidak dapat mengandalkan anggunan atau jaminan dari calon *mudharib*, tetapi semata-mata pada *first way qut* dari calon *mudharib*. Selain kepercayaan diatas harus mempertimbangkan kemampuan usaha yang akan dibiayai untuk menghasilkan dana sebagai sumber pelunasan terhadap pembiayaan yang diterima. Bagi proyek-proyek besar yang memerlukan dana pembiayaan dan akan dibiayai dengan fasilitas *mudharabah*, studi kelayakan yang dibuat oleh konsultan ahli yang independen perlu sekali

²⁶ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Mush-Haf Asy Syarif 1971) hlm, 264

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani 2001) hlm,

diberikan tempat yang sentral dalam mempertimbangkan fasilitas pembiayaan yang dimohon oleh calon *mudharib*.

Akhir dari permasalahan tersebut kembali kepada masing-masing lembaga keuangan syari'ah, jika permintaan jaminan ditetapkan sebagai kontrak, maka akad *mudharabah* menjadi titik valid. Apabila jaminan tersebut merupakan suatu yang siap disita jika terjadi kerugian tanpa mempertimbangkan lebih jauh terhadap sebab-sebab kerugian, apakah memang terjadi mismanajemen (salah urus) yang disengaja seperti penyalahgunaan fasilitas pembiayaan untuk tujuan-tujuan selain yang ditentukan dalam kontrak. Atau kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian atau kesalahan *mudharib* seperti karena faktor alam dengan terjadinya bencana yang tidak diduga-duga.

Hanya saja bila jaminan yang dimbil oleh lembaga keuangan syariah sebagai pelengkap dan berfungsi sebagai pengikat para *mudharib* bahwa dana yang dikelola itu merupakan amanah dari *shahibul maal* sehingga *mudharib* berkewajiban untuk mengembalikan maka kebijakan yang diambil lembaga keuangan syariah untuk mengambil jaminan dapat dimaklumi, mengingat lembaga keuangan tersebut dalam kapasitas sebagai *mudharib* juga memegang tanggung jawab terhadap dana para deposan dan pemegang saham.

D. KESIMPULAN

Sebagai salah satu Unit Usaha Syariah (UUS), Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal wat Tamwil* (KJKS BMT-UGT Sidogiri) Capem Banyuputih, Kab. Situbondo dalam menjalankan kegiatan penyaluran pembiayaan telah melaksanakan prinsip-prinsip perjanjian akad *mudharabah* utamanya akad *mudharabah muqayyadah*. Akad tersebut sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam di mana BMT sebagai wakil *shahibul maal* menentukan batasan/syarat-syarat kepada nasabah/anggota selaku *mudharib* dalam mengelola dana untuk melakukan *mudharabah* di bidang usaha tertentu, cara-cara, waktu dan tempat tertentu pula berladaskan ketaqwaan kepada Allah SWT, saling percaya dan *ukhuwa islamiyah*, serta rasa tanggung jawab dan kehati-hatian yang tinggi.

Terjadinya ingkar janji/wansprestasi dalam akad *mudharabah* pada KJKS BMT-UGT Sidogiri capem Banyuputih, karena pelanggaran isi perjanjian yang telah disepakati dan kurang adanya sifat kejujuran dan kelalaian nasabah/anggota dalam menjalankan usaha serta pengelolaannya yang tidak sesuai standar yang telah ditetapkan kemudian munculnya resiko dan masalah karena ingkar janji tersebut akan diselsaikan melauai jalur perdamaian (*sulhu*) dan atau dilakukan dengan cara *tahkim* (arbitrase) kemudian dengan cara proses peradilan (*al-qadha*) meskipun proses peradilan ini belum pernah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Al-Mush-Haf Asy Syarif 1971
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992
- Abdul Sami' Al Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2014
- Arsip KJKS BMT-UGT Sidogiri, *Tentang Tata cara Penyelsaian Permohonan Pembiayaan*.
- Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, Bandung:Refika Aditama, 2011
- Bagong Suyanto dan Sutina. *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Prenada Media, 2005
- Frassminggi Kamasa, *The Age of Deception: Riba' Dalam Globalisasi Ekonomi, Global dan Indonesia*, Jakarta: Gema Insani, 2012
- Gema Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2006
- Ibnu Hajar, Terjeh. *Bulughul al-maram min adil al-lati al-ahkam*. Bandung: Alma'arif, 1995
- Imam Nahe'I & Asrah Maksum, *Mengenal Qawa'id Fiqhiyyah*, Situbondo: Ibrahimy Press 2011
- Imron Rosidi, *Sukses Menulis Karya Ilmia: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Banyumedia Publising, 2005
- Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Surabaya: Pestaka Tinta Mas 1997
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES), Jakarta: Kencana, 2009
- Lexi J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2007
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana 2012
- M. Dumairi Nor, & dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007
- Moh. Asro Maksum, & Zubari. *Dasar-Dasar Akutansi Syari'ah*, Situbondo: Ibrahimy Press, 2009/2010
- Moh. Djakfar, *Teologi Ekonomi: Membumikan Titah Langit Kerana Bisnis*, Malang: UIN Maliki Press, 2010
- Moh. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam: Gelit Perbankan Syariah di Indonesiat*, Malang: UIN Malang Press, 2009
- Moh. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Depok: Gema Insani, 2009
- Muchsini, *Hukum Perikataan Di Indonesia*, Surakarta: UNS, 1992
- Muhammad, *Managemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisa, 2004

- Muhammad Firdaus, dkk, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syari'ah*, Bandung: Renaisan, 2005
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999
- Mukti Fajar N.D. & Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Muslimin Kara, *Bank Syariah di Indonesia Analisa Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, Jakarta: UII Press, 2005
- Ngatirin, *Dalam Tesisnya: Prinsip –Prinsip Akad Pada BMT Tulang Boyolali*, Surakarta: Pascasarjana Universitas Selas Maret, 2009
- Profil Koperasi Jasa Keuangan Syariah*. (KJKS BMT-UGT SIDOGIRI Capem Banyuputih
- R. Subekti, & R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009
- R. Wirjono Projodikoro, *Azas-azas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur Press, 1981
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Bandung: Aditya Bakti, 2002
- Rulam Ahmadi, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya; Bandung, 2005
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, Terj. Abdurrahim dan Masrukin, Bandung: Alma'arif, 1990
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 13*, terjm, H. kamaluddin A.Mazuki, Bandung: Al-ma'arif,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Soejono Soekanto dan Sri Manuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baruh Agensindo, 1994
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Jilid II*, Jogjakarta: Andi Of Ceet, 1984
- Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan di*, Jakarta: Grafiti, 2005
- Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: CV. Rajawali 1990
- Trikaloka H. Putri, *Kamus Perbankan*, Jogjakarta: Mitra Pelajar, 2009
- Wawancara dengan karyawan (AOP) KJKS BMT-UGT Sidogiri Capem Banyuputih (Hairul Wasul) pada tanggal 21 Agustus, 2016.